

Perbukuan Kita: Minim Apresiasi dan Marak Pencurian Hak Cipta?



Oleh: Wahid Kurniawan

(Peminat Sastra dan Alumnus Sastra Inggris di Universitas Teknokrat Indonesia)

Dunia memandang buku dengan penuh penghormatan, penghargaan, dan nostalgia. Ada satu hari yang menegaskan hal itu. Alkisah, di kota Paris tahun 1995, sejumlah peserta Konferensi Umum UNESCO mengajukan penghormatan atas buku. Kata mereka, perlu ada tanggal khusus untuk merayakan kelahiran buku-buku. Selain itu, mereka mengingat perjuangan para penulis ini yang menahun berproses demi menghasilkan sebuah karya. Oleh sebab itu, dicetuskanlah tanggal 23 April sebagai hari Buku Sedunia. Tanggal itu menjadi penghormatan bagi sejumlah penulis terkenal dunia, mulai dari Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega, sampai William Shakespeare yang wafat di tanggal tersebut.

Sejak itu, masyarakat dunia pun sepakat memperingatinya setiap tahun. UNESCO sebagai pencetusnya pun tak urung memilih satu kota sebagai ibu kota buku dunia. Bagi yang terpilih, berbagai acara untuk merayakan dan bernostalgia dengan buku digelar. Dan tahun 2023 ini, kota Accra di Ghana terpilih lantaran fokusnya yang kuat terhadap potensi budaya Ghana dan keterlibatan kaum muda di dalamnya.

Memang, perayaan hari buku sedunia itu sudah lewat. Akan tetapi, bukan hal salah menjadikan ajang itu sebagai momen refleksi diri. Katakanlah, tahun depan atau sekian tahun kelak Indonesia mau mencalonkan salah satu kotanya untuk menjadi ibu kota hari buku sedunia, dan kita pun bertanya-tanya, apa saja yang kira-kira diperhatikan lebih dulu? Bayangan ini mungkin terdengar muluk sebab toh negara ini belum sepenuhnya terbebas dari segudang

permasalahan terkait literasi dan perbukuan. Untuk itu, sebelum bayangan soal ibu kota buku sedunia itu muncul, ada serentetan pertanyaan lanjutan soal masalah perbukuan ini: sejauh mana pemerintah peduli dengan perkembangan literasi, dunia perbukuan, dan dinamika masyarakat dengan bacaan? Apa saja permasalahan yang perlu diatasi hingga kita bisa merasa pantas mengajukan salah satu kota sebagai calon ibu kota buku sedunia?

Mari kita perjelas soal minat membaca masyarakat dan situasi perbukuan di Indonesia saat ini. Kalau melihat data Perpustakaan Nasional (Perpusnas), perhitungan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Indonesia mencapai poin 63,9 pada tahun 2022 kemarin. Angka ini membanggakan, mengingat angka tersebut meningkat sebesar 7,4% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai poin 59,52 poin. Angka ini terhitung tinggi, apalagi terdapat peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, soal situasi perbukuan, pada 27 Februari 2023, sebenarnya pemerintah melalui Kemendikbudristek RI baru meluncurkan program *Merdeka Belajar Episode Ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia* yang bertujuan mengirimkan sebanyak mungkin bacaan bermutu ke daerah-daerah T3 (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Harapannya, program ini bisa meningkatkan akses anak-anak dalam mendapatkan bacaan bermutu yang berperan dalam proses pendidikan mereka. Ditambah, pamor kesusastraan Indonesia sudah layak diadu di kancah global.

Selayang pandang, situasi perbukuan dan kepedulian pemerintah cukup patut diacungi jempol. Akan tetapi, sekian pencapaian itu tidak lantas menyangkal keberadaan permasalahan lain yang mengerak dalam dunia perbukuan tanah air. Kita terkesan sedang mengalami fase *keblinger* menerbitkan buku. Di bidang akademik, misalnya, buku-buku hadir tanpa henti dan tak semuanya diterbitkan dengan mempertimbangkan kualitas isinya. Jika tahun 2022 kemarin hal ini menimbulkan masalah dibatasinya kuota ISBN lantaran ramainya arus penerbitan (Perpusnas, 2022), permasalahan yang terlihat sekarang, salah satunya, adalah terkait minimnya apresiasi.

Ya, hal itu terdengar muskil mengingat sudah banyak klub buku, forum diskusi, komunitas literasi, dan perkumpulan lain yang rajin mendiskusikan dan mengapresiasi sebuah buku. Akan tetapi, mengapa ini dibilang minim apresiasi? Itu hanya satu hal sebab di balik kemonceran itu, masih banyak buku yang terkesan datang lantas dilupakan. Tidak sedikit buku

diterbitkan tanpa diberi ruang apresiasi yang memadai. Keberadaan mereka pun tak lebih sebagai barang jualan yang nasibnya sepenuhnya ditentukan pasar. Parahnya lagi, penerbitan buku ini hanya berfungsi mendongkrak status penulisnya semata. Dengan adanya tulisan yang diterbitkan, maka angka publikasi penulis pun naik, dan itulah yang mereka kejar. Oleh sebab itu, nasib buku-buku ini sudah tergambar sejak awal: mereka keluar dari percetakan, diiklankan seadanya, lalu lambat-laun waktu menguburnya. Nilai intelektual sebuah buku sebagai salah satu sumber pengetahuan pun seolah terlucuti seketika.

Di sisi lain, geliat penerbitan buku juga merambah pada penerjemahan karya para penulis dunia. Pihak-pihak seperti pemerintah, pendidik, sampai para pelaku perbukuan semakin giat dalam pengadaan bacaan terjemahan. Peredaran karya terjemahan pun naik dari tahun ke tahun. Di pasaran, kita bahkan bisa mendapati tren terjemahan karya penulis Asia Timur—Jepang dan Korea Selatan—sebagai imbas budaya *J-Pop* dan *K-Pop* yang lebih dulu datang lewat film dan musiknya. Tapi sayangnya, kian ramainya arus penerbitan karya terjemahan masih menyisakan sejumlah permasalahan mulai dari maraknya buku bajakan sampai pencurian hak cipta. Terkhusus perihal hak cipta ini, masih banyak para pelaku perbukuan yang tak memperdulikannya. Biasanya, mereka menerbitkan karya tanpa membeli hak terjemahan karya, bahkan tanpa mengontak penulis dan penerbit pertama yang memiliki hak ciptanya. Mendapati hal itu, kita tentu tak bisa menutup mata. Ada beberapa hal yang bisa kita dan pemerintah lakukan. Pertama, kepedulian terkait pengadaan buku di berbagai sektor mesti ditingkatkan tanpa melucuti nilai intelektualitas dan apresiasinya. Pemerintah, melalui Perpustakaan perlu memperketat syarat pengadaan buku sehingga timbul tanggung jawab yang tinggi bagi mereka yang hendak menerbitkannya. Hal itu juga terkait kualitas isi, alur pemasaran, dan pertimbangan soal penyerapan pasar. Mereka juga hendaknya merangkul banyak penerbit, supaya semangat dan kepedulian serupa dapat disebarakan secara merata

Kedua, bagi pelaku perbukuan yang berkiprah dalam pengadaan bacaan terjemahan, sudah saatnya kepedulian terkait hak cipta menjadi kode etik yang mesti dimiliki dengan baik. Sebab toh kita tak bisa menyangkal kalau karya terjemahan memiliki kedudukan yang penting bagi kemajuan peradaban bangsa, sebagaimana yang dikatakan Anton Kurnia, dalam bukunya

Seni Menerjemahkan Karya Sastra (Diva Press, 2022). Oleh karena itu, penghormatan atas kerja-kerja intelektual—dalam hal ini penerjemahan—menjadi hal yang dipahami bersama.

Lagi pula, selain menjadi peringatan Hari Buku Sedunia, tanggal 23 April yang lalu juga diperingati sebagai Hari Hak Cipta. Dengan begitu, apabila kelak pemerintah hendak mencalonkan salah satu kota di Indonesia sebagai calon ibu kota buku dunia, kita tahu masalah apa saja yang mesti ditangani dan diselesaikan terlebih dahulu sehingga negara kita bisa tampil dengan percaya diri di kancah perbukuan global.